



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 20 Januari 2025

Halaman: 2

Dewan Ingatkan Beda Kondisi Kota dengan Kabupaten

Pelantikan Mundur, Hasto Wardoyo Khawatir Ketinggalan Gerbong Anggaran

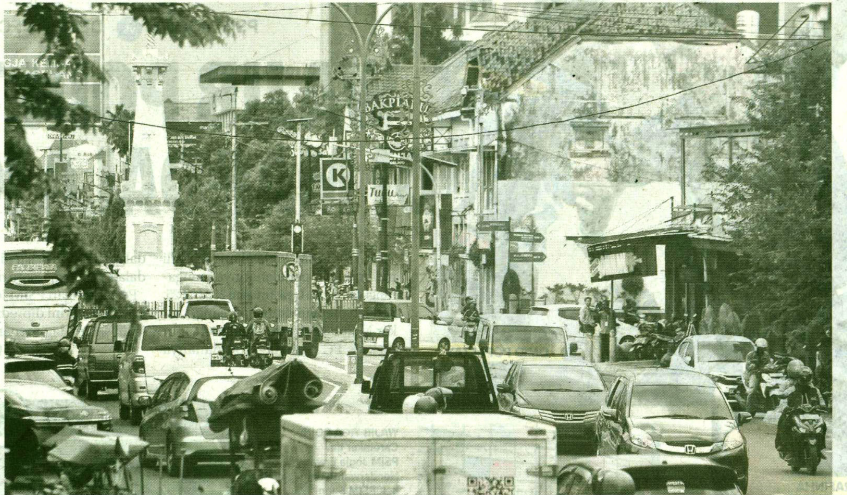
JOGJA – Anggota legislatif mewanti-wanti kepada pasangan calon kepala daerah terpilih Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan ketika nantik sudah terlanjut. Sebab permasalahan di Kota Jogja cukup kompleks. Wakil Ketua II DPRD Kota Jogja Triyono Hari Kuncoro mengatakan, dari segi pengalaman, Hasto Wardoyo memang pernah menjabat sebagai bupati Kulonprogo. Sehingga menurutnya, politikus PDI Perjuangan itu akan lebih cepat menyesuaikan diri ketika sudah dilantik sebagai kepala daerah nanti. "Dari sisi tata kelola pemerintahan (Hasto Wardoyo) pasti sudah lebih paham," ujar Kuncoro, kemarin (19/1).

Kendati begitu, politikus PKS itu mengingatkan, bahwa ada perbedaan signifikan antara pemerintah kota dan kabupaten. Salah satunya, dalam hal besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang perbedaannya cukup jauh. Contohnya saja dari segi target pendapatan. Dalam pembahasan APBD Kota

Jogja 2025, wilayah tersebut memiliki target pendapatan Rp 5,4 Triliun. Sementara di APBD 2025 Kabupaten Kulonprogo proyeksi pendapatannya hanya ditetapkan Rp 1,729 Triliun.

Menurut Kuncoro, dengan porsi APBD Kota Jogja yang lebih besar daripada kabupaten Kulonprogo tentu membuat kepala daerah lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan. Namun di satu sisi, tentu kompleksitas masalah di perkotaan tentu juga akan lebih banyak. Salah satu yang cukup banyak, yakni permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai. Serta permasalahan tata kelola wilayah dan formula yang tepat untuk mengurangi angka pengurangan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kuncoro menyebut, mundurnya pelantikan kepala daerah juga akan membuat pasangan calon (paslon) tidak bisa langsung merealisasikan visi misi dan janji kampanyenya. Selain itu, akan menunda penyusunan Rancang-



KAWASAN PADAT: Pengendara kendaraan bermotor melintas di Jalan Diponegoro, Kota Jogja, kemarin (19/1). Legislatif mewanti-wanti wali kota Jogja terpilih karena permasalahan di Kota Jogja cukup kompleks, mulai dari sampah, tata kelola wilayah hingga angka pengangguran yang cukup tinggi.

an peraturan daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Dengan pelantikan yang mundur, kepala daerah tidak bisa melakukan *refocusing* anggaran. Padahal itu penting," imbuhnya. Menyikapi mundurnya jadwal

pelantikan kepala daerah Hasto Wardoyo mengaku, memang cukup khawatir terkait hal tersebut. Sebab dengan semakin mundurnya waktu pelantikan, dapat membuat kepala daerah tidak bisa ikut dalam pembahasan APBD 2026 secara formal.

Sebab berdasarkan pengalaman sebagai Bupati Kulonprogo, pembahasan APBD 2026 bisa dimulai sejak awal Maret. Sebagaimana diketahui, pelantikan kepala daerah memang mundur dari jadwal sebelumnya di Februari. Kabar terakhir, pe-

lantikan kepala daerah kemungkinan baru bisa dilakukan pada pertengahan Maret. Melihat kondisi tersebut, Hasto khawatir apabila nantinya ada program-program yang sudah disiapkan ketinggalan gerbong anggaran. (inu/din/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005